
**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN CIVITAS
ACADEMICA (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN PARA
KADER POSYANDU LANSIA DI DESA CIKAKAK,
BANYUMAS)**

**Dimas Purbo Pambudi¹, Titi Rahmawati², Muhammad Riyan
Fitria Ramdlani³, Neneng Sobibatu Rohmah⁴, Chanifia Izza
Millata⁵**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
e-mail : dimas.purbo@unsoed.ac.id

Abstrak

Kolaborasi dalam pengabdian masyarakat dapat melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah desa adalah model kesiapterapan IPTEK (ilmu, pengetahuan dan teknologi) dalam merancang program pembangunan kearah yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi dan inovasi untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengabdian, menghadirkan solusi berdasarkan kajian akademik bagi kebutuhan komunitas/ masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan *field experiment* dengan observasi dan wawancara mendalam. Temuan inti dalam riset ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan civitas merupakan model pemberdayaan partisipatif yang dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja program. Kesimpulan yang dari riset ini adalah kolaborasi dalam pemberdayaan dapat terlaksana dengan penyampaian berbagai materi edukatif dan membekali kemampuan praktis pengoperasian alat GSR-Pro untuk mengaplikasikan *value of slow living* Banyumas. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, pertama, dibutuhkan aturan formal untuk meningkatkan intensitas dan kualitas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan; kedua, pemerintah desa harus memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengoptimalkan berbagai sumberdaya; ketiga, dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak maka dapat melibatkan partisipasi masyarakat agar lebih optimal.

Kata kunci: Kolaborasi, Pemberdayaan, Kader TP Posyandu

^{1 2 3 4 5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

Collaboration in community service can involve various parties, including village governments, as a means of implementing and internalizing science and technology (knowledge, science, and technology) to improve the well-being of the people. This study aims to explore the application of technology and innovation to develop a community empowerment model, enhance the capacity for service, and provide solutions based on academic studies for the needs of the community. The method used in this research is qualitative descriptive with a field experiment approach, involving observation and in-depth interviews. The key findings of this study indicate that collaboration between the village government and the academic community constitutes a participatory empowerment model that can enhance the capacity and performance of programs. The conclusion from this research is that collaboration in empowerment can be implemented through the delivery of various educational materials and equipping practical skills in operating the GSR-Pro tool to apply the value of slow living in Banyumas. This study recommends several points: first, formal regulations are needed to enhance the intensity and quality of collaboration with various parties to ensure sustainability; second, village governments should facilitate various stakeholders to optimize available resources; third, in collaborating with multiple parties, community participation should be involved to achieve optimal results.

Keyword: Collaboration, Empowerment, Elderly Health Post Cadres

A. PENDAHULUAN

Kolaborasi dalam setiap pengimplementasian kebijakan sangat dibutuhkan. Hal tersebut diperlukan karena Indonesia terdiri atas berbagai wilayah dan kewenangan (dari mulai pemerintah pusat hingga pemerintah desa) yang dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi. Hal tersebut memungkinkan ruang kolaborasi yang lebih luas serta membebaskan daerah mengelola kewenangannya dikarenakan berbagai faktor seperti geografis, keanekaragaman masyarakat, dan kearifan lokal (Fahlevy & Burhanudin, 2022). Hal utama yang menjadi fokus untuk mengembangkan daerah adalah potensi masyarakatnya di bidang ekonomi dan ciri khas yang dimilikinya (Ginting et al., 2024). Salah satunya dasar aturan wujud kepedulian negara pada masyarakatnya adalah Undang-Undang tentang

Kesejahteraan Lansia Nomor 13 tahun 1998. Pengimplementasian UU tersebut membutuhkan sinergi, kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak diantaranya adalah pihak desa dan para kader tim pembina untuk mengoptimalkan kebermanfaatan posyandu lansia.

Posyandu lansia adalah tempat para lansia dapat memperoleh layanan kesehatan di tempat yang telah disepakati bersama antara masyarakat dan para kadernya (Latumahina et al., 2022). Posyandu lansia yang telah berjalan sejauh ini sudah cukup baik dan efektif untuk mawadahi kebutuhan kesehatan lansia seperti cek kesehatan dan sebagainya. Sebagai upaya mengoptimalkan dampak positifnya, dibutuhkan ruang kolaborasi salah satunya dengan civitas academica (dosen) mengingat salah satu peran dan kewajiban dari civitas academica (dosen) adalah untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh civitas academica harus disertai dengan inovasi untuk mengembangkan model dan kapasitas pengabdian, menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, mampu melakukan alih teknologi untuk serta menghadirkan inklusi sosial untuk mengoptimalkan sumber daya.

Kolaborasi antar aktor (hingga tingkat pemerintah desa) sangat dibutuhkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat agar lebih berdaya. Lingkup kolaborasi juga luas sebagaimana (Farah & Makmur, 2022) menunjukkan berlangsungnya kolaborasi dalam hal pengelolaan sampah, perencanaan, sosialisasi hingga pengolahan sampah. Hasil riset (Mulyantari et al., 2022) menunjukkan bahwa kolaborasi juga dapat dioptimalkan untuk mengembangkan salah satu unit usaha BUMDES agar lebih maju dalam mengelola *floating resto*. Selain itu, riset (Nugroho, 2022) menunjukkan perlunya kolaborasi yang dilakukan BUMDES untuk menyukkseskan desa wisata. Dalam kolaborasi dibutuhkan kerjasama dan peran dari berbagai pihak, salah satunya peran pemerintah desa sebagaimana riset (Widyaswara et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan bagi para mantan pekerja migran. Berdasarkan uraian di atas, kolaborasi antar pihak, dalam berbagai hal sangat diperlukan untuk menghadirkan dampak positif bagi masyarakat desa.

Kolaborasi sangat dibutuhkan salah satunya dalam mengoptimalkan posyandu lansia mengingat masih adanya berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga kesehatan dan kader, rendahnya pengetahuan dan keterampilan kader, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai posyandu lansia, serta rendahnya partisipasi lansia dan keluarga. Ada beberapa pemberdayaan yang dilakukan salah satu diantaranya adalah (Dyahariesti et al., 2024) yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengukuran kesehatan dari yang awalnya ada 2 pengukuran menjadi 5 pengukuran yang dilakukan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika dilakukan pemberdayaan maka dapat terjadi peningkatan kualitas, kemampuan dan pengetahuan para kader posyandu lansia.

Posyandu lanjut usia dapat menjadi tempat untuk mendapatkan layanan terpadu seperti cek kesehatan (tekanan darah, tinggi badan, berat badan dan sebagainya), bisa juga menjadi tempat menyampaikan edukasi seputar pola hidup sehat, menjaga makanan di masa tua dan sebagainya. Posyandu lansia juga terbilang lengkap dalam memberikan layanan seperti pelayanan sosial keagamaan, memberikan pengetahuan dan berbagai skill/ kemampuan dalam membuat sesuatu, memberikan semangat bagi para lansia untuk dapat beraktivitas seperti berolahraga, menekuni kesenian, dan sebagainya untuk membuat para lansia merasa lebih sejahtera dan jauh dari keterasingan (Amilahaq et al., 2024).

Melihat kondisi empiris, ada beberapa permasalahan yang sering membuat kurangnya partisipasi lansia untuk hadir diantaranya seperti posyandu yang jauh dari rumahnya, tidak dapat hadir karena masih bekerja, perasaan malu jika menceritakan kondisi kesehatannya pada orang lain, kurang paham tentang pentingnya posyandu ini, hingga kurang sabar menunggu dan penilaian terhadap kader yang dianggap kurang bersahabat/ ramah (Lusi et al., 2024). Selain permasalahan, hal riset dari (Julianti et al., 2024) justru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap posyandu lansia mencapai 90%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ada sekitar 296.777 akan tetapi yang masih berjalan hanya sekitar delapan puluh persen (80%) saja di seluruh Indonesia (Oktarina et al., 2024). Berdasarkan data dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, Posyandu lansia di Banyumas tersebar di 2548 titik (Tengah, 2024). Penulis memilih salah satu lokasi yaitu posyandu lansia di desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Banyumas. Ada berbagai pertimbangan mengapa lokasi dipilih, diantaranya adalah karena best practice Posyandu lansia mereka sudah teruji dengan ditetapkannya Posyandu lansia Wredha Utama sebagai juara 1 di tingkat Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 (Wangon, 2022). Hal tersebut menarik untuk dijadikan lokasi pengabdian, di sisi lain struktur kepengurusan sudah terbentuk dan kekompopakkan sudah terjalin diantara para kader, serta pengalaman melayani masyarakat lansia sudah teruji.

Ada kebaruan yang dihadirkan dalam riset ini yaitu fokus kolaborasi dalam pemberdayaan para kader posyandu lansia ini untuk dapat lebih memaknai dan mengajarkan prinsip slow living. Slow living adalah ritme dalam menjalani kehidupan yang berlawanan dengan hidup yang modern dengan cara memperlambat aktivitas dengan berorientasi pada kualitas hidup individu (Ranuhandoko et al., 2025). Riset ini juga menghadirkan solusi konkret untuk mendeteksi tingkat stres pada lansia dengan penggunaan alat GSR (Galvanic Skin Response) untuk menunjang layanan posyandu lansia. Berdasarkan berbagai deskripsi permasalahan dan data yang disebutkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana berjalannya kolaborasi antara pemerintah desa dengan civitas academica dalam pemberdayaan para kader posyandu lansia?. Hal ini menjadi menarik mengingat belum adanya keterlibatan langsung dari kaum intelektual untuk menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas kognitif dan praktis bagi para kader.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena fokus kajiannya diarahkan pada bounded system (terikat secara jelas pada ruang, waktu, dan aktivitas tertentu dalam hal ini pemberdayaan kader Posyandu Lansia di Desa Cikakak, Banyumas). Bounded system tersebut berfungsi sebagai unit analisis yang menjadi dasar penelusuran dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan civitas academica. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari kepala desa Cikakak, ketua kader posyandu lansia, 60 kader aktif dan 6 orang lansia sebagai sampelnya, serta delapan perwakilan civitas academica yang terlibat dalam program pendampingan. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipan moderat, yaitu peneliti hadir dalam beberapa kegiatan pemberdayaan tetapi tidak terlibat sebagai pengambil keputusan, sejalan dengan panduan observasi kualitatif dalam penelitian sosial (Rahmawati & Wibowo, 2015).

Sebagai upaya guna meningkatkan ketajaman temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik, meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen seperti laporan kegiatan Posyandu dan program pengabdian civitas academica. Teknik analisis data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif. Sebagaimana dalam (Pambudi et al., 2025) analisis data kualitatif yang dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan saling menguatkan (Suharto, 2016). Penggunaan desain studi kasus juga mengharuskan peneliti memperhatikan konteks sosial-kultural desa sebagai lingkungan yang mempengaruhi proses kolaborasi, sesuai prinsip studi kasus kualitatif dalam penelitian pendidikan dan kebijakan publik (Rahardjo, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Collaboratif Governance

a. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal di desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah khususnya untuk berjalannya Posyandu lanjut usia sudah cukup baik. Keberadaannya dapat membantu untuk melayani para lansia untuk pemeriksaan kesehatan, mengedukasi dalam setiap kegiatan. Berdasarkan (Ervianti, 2018) dalam terselenggaranya kegiatan, dapat menemui hambatan khususnya sumber daya yang dapat berpotensi menjadi masalah dalam setiap kegiatan. Hambatan yang lainnya adalah masih minimnya keterlibatan civitas academica (khususnya dosen) untuk terlibat dalam kegiatan posyandu lansia sehingga sangat diperlukan guna meningkatkan kapasitas pengelolaan posyandu ini. Saat awal berjalan, Posyandu ini sudah mendapat respon yang baik dari masyarakatnya mulai dari para kadernya, tokoh masyarakat hingga kepala desa dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam hal kemampuan sumberdaya, masih ditemui kekurangan seperti masih minimnya tenaga kesehatan yang dapat dilibatkan untuk mengedukasi para lansia, diharapkan dapat melibatkan dokter untuk meningkatkan kualitas layanannya. Berkaitan dengan kolaborasi, dibutuhkan akses sumberdaya seperti keuangan, sumber daya teknis dan SDM, serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan kolaborasi. Berjalannya Posyandu lansia di Cikakak telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa khususnya kepala desa. Dukungan tersebut berupa dukungan moril dan materiil yang berkontribusi untuk mendukung peningkatan kapasitas para kader TP Posyandu Cikakak (60 orang) menjalankan posyandu lansia yang tersebar di 6 posyandu di desa ini, serta terbukti dengan prestasinya yang keluar sebagai juara pertama pada tingkat Kabupaten Banyumas dalam hal pengelolaan posyandu di tahun 2022.

Dinamika hubungan antaraktor dalam kolaborasi antara pemerintah desa dan civitas academica di Desa Cikakak menunjukkan pola interaksi yang saling

melengkapi namun tetap dipengaruhi struktur kewenangan yang berbeda. Meskipun kedua pihak memiliki komitmen terhadap pemberdayaan kader Posyandu Lansia, hambatan muncul berupa keterbatasan waktu civitas academica dan birokrasi internal desa yang kurang responsif dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemerintah desa memiliki kekuatan berupa legitimasi formal dan kedekatan dengan masyarakat, sedangkan civitas academica membawa sumber daya keilmuan, metode pemberdayaan, dan kapasitas pendampingan. Kombinasi kekuatan tersebut sebenarnya menciptakan peluang kolaborasi yang produktif, namun tidak selalu berjalan optimal karena perbedaan ritme kerja dan ekspektasi. Ketika diterapkan di lapangan, konsep ideal kolaborasi partisipatif sering tidak sepenuhnya terwujud, terutama karena sebagian kader masih pasif dalam proses pengambilan keputusan. Hanya ketua kadernya yang berinteraksi secara aktif. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori kolaborasi yang menekankan kesetaraan aktor dengan praktik yang masih dipengaruhi hierarki dan keterbatasan kapasitas lokal.

b. Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif merupakan satu elemen utama untuk menentukan keberhasilan kolaborasi. Sebagaimana (Chris Ansell & Gash, 2007) yang menjadikan syarat bahwa pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah orang yang memimpin dengan kemampuan fasilitatif, yang dapat membuka akses untuk menjadi fasilitator bagi semua pemangku kepentingan guna melakukan perundingan, memfasilitasi untuk pertemuan secara langsung, mengusahakan untuk menumbuhkan kepercayaan para pihak yang terlibat, membuat komitmen yang disetujui bersama-sama, membuat strategi, merancang desain peta jalan kolaborasi, serta menyusun visi dan misi serta berbagai tujuan bersama yang disetujui dengan kesepakatan kolektif.

Keterkaitan dengan kolaborasi untuk memberdayakan para kader TP Posyandu lansia, peran kepala desa untuk menjadi penghubung antara para kader, civitas academica, serta masyarakat dapat dikategorikan sebagai pemimpin fasilitatif. Kepala desa Cikakak dapat secara konsisten mampu menjadi fasilitator

untuk menyediakan wadah pertemuan dan interaksi antara dosen dan para kader serta para lansia. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin dapat terlibat untuk memberikan dukungan bagi masyarakatnya, untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Merujuk pada (Arifin et al., 2017) dalam (Abijaya et al., 2021) menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang dapat memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku orang lain, membuat mereka bisa bekerjasama, yang pada akhirnya dapat membentuk kolaborasi harmonis berlandaskan kinerja yang efektif dan efisien guna mendapat data produktivitas kerja berdasarkan pada hasil yang sudah ditetapkan sehingga membentuk kolaborasi yang harmonis berdasarkan efisiensi dan efektivitas untuk mendapatkan data produktivitas kerja berdasarkan hasil yang telah ditetapkan.

Pada konteks ini, kepala desa dapat berperan penting untuk mendorong kemajuan dan kemampuan para kader untuk lebih berpengetahuan serta memiliki keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerimaan dan surat persetujuan dari kepala desa Cikakak untuk menjalin kerjasama dalam rangka pemberdayaan para kader TP Posyandu lansia. Hal ini penting mengingat masih minimnya keterlibatan civitas academica (dosen) dalam memberikan perhatian dan kontribusi kepada para kader tersebut. Selain itu, partisipasi dan kedatangan kepala desa di setiap kegiatan juga dapat mencerminkan kepedulian dan upaya untuk mempersatukan berbagai pihak mulai dari para akademisi, para kader serta para lansianya.

Dinamika hubungan antar aktor telah berjalan dengan baik tidak ada hambatan yang berarti. Kepala desa memfasilitasi proses diskusi, bertukar gagasan dan membantu kelancaran proses kerjasama dalam kapasitasnya sebagai kepala desa yang memiliki kewenangan untuk menyetujui. Hal tersebut menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktiknya sehingga proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik dengan hadirnya kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh kepala desa.

c. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Mengutip dari Ansell And Gash dijelaskan bahwa point penting berikutnya yang harus menjadi fokus adalah aturan yang jelas dan mekanisme/ prosedur. Aturan seharusnya diimplementasikan seadil-adilnya dan penuh keterbukaan sehingga berbagai pemangku kepentingan dapat memahami bahwa berlangsungnya musyawarah dan negosiasi adalah nyata serta tidak ada unsur menutup nutupi kesepakatan yang dirahasiakan. Dalam hal penerapan posyandu lansia, aturan sudah diterapkan yang menjadi landasan operasionalnya. Aturan memuat tentang apa urgensi layanan posyandu lansia, siapa saja yang terlibat dan berbagai tugas pokok dan fungsinya agar ketika diimplementasikan ada kejelasan di berbagai daerah. Aturan dibuat untuk ditaati guna mengatur, membuat ketertiban dalam tata kelolanya, serta menjadi petunjuk teknis guna menjamin keberlangsungan posyandu lansia.

Berlangsungnya suatu kegiatan seperti posyandu lansia ini, sangat membutuhkan dasar aturan atau regulasi untuk menjamin keberlangsungannya dan memastikan kepastian hukumnya. Dasar hukum utama pelaksanaan Posyandu Lansia meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjadi payung hukum utama kesehatan di Indonesia, serta Permenkes Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas. Selain itu, UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Permensos Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program ATENSI berbasis masyarakat juga memberikan landasan hukum untuk kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan lansia. Pada tingkat daerah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang lebih rinci membahas berbagai aspek pelayanan bagi lansia, termasuk kesehatan di posyandu. Namun pada tingkat desa belum didukung oleh peraturan desa tentang posyandu lansia.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa adalah membuat regulasi seperti peraturan desa (Perdes) dan sejenisnya untuk menjamin kolaborasi tetap terjaga dengan berbagai pihak. Adanya regulasi yang mengatur kolaborasi dapat mempermudah berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya pada masyarakat desa khususnya di Cikakak, Kabupaten Banyumas. Peraturan desa harus didesain untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam mengoptimalkan berbagai sumberdaya, seperti sumber daya manusia, wisata, dan sebagainya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu, jika diperlukan dapat melibatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan dalam membuat aturan, agar perangkat desa dan kader Posyandu lebih mengerti pengelolaan serta penyusunan dokumen kerjasama dan kesepakatan dengan berbagai pihak demi kemajuan pengelolaan dan berjalannya posyandu lansia.

Dinamika hubungan antar aktor telah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada hambatan secara regulasi sehingga kolaborasi dapat terwadahi dengan baik. Selain itu, kewenangan yang melekat telah digunakan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal tersebut tercermin dari pengambilan keputusan, proses diskusi dan bersedianya kepala desa untuk memberikan persetujuan yang itu merupakan kewenangannya (dibuktikan dengan surat persetujuan). Tidak ada kesenjangan antara teori dan praktik dalam proses kolaborasi. Hal ini dibuktikan secara kelembagaan tidak menghambat proses kolaborasi, tidak dibutuhkan musyawarah desa dalam pengambilan keputusan, dan keputusan dapat diambil dengan proses diskusi yang egaliter dan berprinsip pada kebaikan bersama serta kebermanfaatannya selama dalam proses kolaborasi.

d. Proses Kolaborasi (*Colaborative Process*)

Berbagai prosedur tertentu pada proses terjadinya kolaborasi penting untuk menunjang keberhasilan suatu program. Memulai kolaborasi dapat dilakukan dengan membangun rasa saling percaya diantara berbagai pemangku kepentingan dengan jalan berdiskusi secara efektif dan berkomitmen kuat satu dengan yang lain. Pemerintah desa telah secara intensif berdialog dan bekerjasama dengan para kader,

hal tersebut juga yang terlihat dengan penerimaan yang baik bagi para civitas academica dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.

Pada tulisan ini kolaborasi yang terjalin dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan seperti seminar/ pelatihan (workshop) antara dosen dan para kader yang dilaksanakan rentang waktu bulan Juni hingga Agustus 2025. Pertemuan ini untuk memberdayakan para kader TP Posyandu agar lebih berdaya secara kognitif atau pengetahuan. Pengetahuan yang diberikan bertujuan untuk menambah keberdayaan para kader dalam memberikan layanan posyandu lansia agar lebih cakap dan berkompeten. Berbagai materi yang disampaikan diantaranya adalah memberikan pemahaman mengenai makna hidup sebagai lansia, membangun semangat kewirausahaan, cara untuk meningkatkan value of slow living, serta praktek meditasi disertai dengan praktek penggunaan alat GSR (*galvanic skin response*) untuk mendeteksi stres ringan sedang dan berat untuk selanjutnya dapat digunakan saat pelayanan di posyandu lansia.

Proses kolaborasi antara pemerintah desa dan civitas academica dalam pemberdayaan kader Posyandu Lansia menunjukkan dinamika hubungan aktor yang saling melengkapi namun tetap dipengaruhi perbedaan peran dan kepentingan. Hambatan muncul ketika keterbatasan waktu pendampingan, birokrasi desa, serta variasi kapasitas kader mengurangi efektivitas koordinasi. Masing-masing aktor sebenarnya memiliki kekuatan dan sumber daya yang signifikan, seperti legitimasi formal dan kedekatan sosial dari pemerintah desa, serta kompetensi teknis dan metodologis dari civitas academica. Namun, sinergi tersebut tidak selalu tercapai karena ekspektasi dan ritme kerja antaraktor sering kali tidak selaras. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori kolaborasi yang idealnya bersifat partisipatif dan setara dengan praktik lapangan yang masih dipengaruhi hierarki dan keterbatasan operasional.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat menekankan peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengendalikan keputusan yang mempengaruhi

kehidupan mereka (Suharto, 2010). Dalam konteks Posyandu Lansia, pemberdayaan kader berarti mendorong mereka memiliki keterampilan teknis, kepercayaan diri, dan kemampuan mengambil peran aktif dalam layanan kesehatan berbasis komunitas. Proses ini selaras dengan pendekatan *capacity building* yang menempatkan kader sebagai penggerak utama dalam penyampaian layanan publik tingkat dasar. Pemberdayaan juga mencakup transfer pengetahuan dari aktor eksternal, seperti civitas academica, agar kader mampu memahami isu kesehatan lansia secara lebih komprehensif. Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat menyediakan landasan konseptual penting bagi peningkatan kualitas layanan Posyandu Lansia melalui penguatan kapasitas kader.

Penerapan teori pemberdayaan dalam praktik Posyandu menegaskan pentingnya partisipasi aktif kader dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (Widjajanti, 2011). Pendekatan ini memungkinkan kader tidak hanya menerima instruksi, tetapi juga mengembangkan inisiatif berbasis kebutuhan nyata lansia di desa. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan civitas academica memperkuat proses pemberdayaan melalui penyediaan pendampingan, pelatihan, dan supervisi teknis yang berkesinambungan (Widyastuti & Nurhayati, 2019). Namun, efektivitas pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan pendampingan serta kesediaan kader untuk terlibat dalam proses refleksi dan pengambilan keputusan (Fitriani et al., 2020). Oleh karena itu, teori pemberdayaan memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagai aktor kunci dalam pelayanan kesehatan komunitas.

3. Konsep Kapasitas Kader Posyandu Lansia dan Konsep Slow Living

Konsep kapasitas kader Posyandu Lansia mencakup kombinasi pengetahuan, keterampilan teknis, komunikasi, dan kemampuan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan layanan kesehatan berbasis komunitas secara efektif, termasuk pengukuran tanda-tanda vital, pengisian lembar KMS, serta edukasi promotif dan preventif bagi lansia (Dyahariesti et al., 2025). Kapasitas ini bukan hanya sekadar pemahaman materi kesehatan lansia, tetapi juga kemampuan kader

untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dalam interaksi nyata dengan lansia serta keluarga mereka di tingkat desa (Iswantiningsih & Margaretha, 2024). Dalam banyak studi, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan pendampingan terbukti meningkatkan keaktifan kader dalam kegiatan Posyandu Lansia dan berdampak langsung pada kualitas hidup lansia di masyarakat (Ratnasari, 2018).

Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas kader membantu memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan lokal yang mampu memotivasi partisipasi lansia serta mengadaptasi layanan Posyandu berdasarkan kebutuhan komunitas setempat (Rusdi et al., 2025). Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan kader tidak hanya menguatkan aspek teknis, tetapi juga memperluas dimensi sosial dan ekologis dari pelayanan kesehatan masyarakat yang responsif terhadap perubahan demografis lansia. Kapasitas kader yang optimal menjadi kunci dalam implementasi intervensi kesehatan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap situasi lapangan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas kader merupakan strategi penting dalam memperkuat sistem kesehatan primer di tingkat desa melalui Posyandu Lansia.

Pada riset ini memiliki fokus mengenai pembahasan slow living sehingga para kader dapat mengimplementasikan ilmunya untuk para lansia. Konsep slow living dipahami sebagai pendekatan hidup yang menekankan kesadaran, ritme yang lebih pelan, serta pemilihan aktivitas yang bermakna untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan psikososial. Dalam perspektif pemberdayaan komunitas, slow living relevan karena mendorong masyarakat—termasuk kader Posyandu Lansia—untuk fokus pada praktik kesehatan yang berkelanjutan dan tidak tergesa-gesa dalam proses pelayanan. Pendekatan ini selaras dengan gagasan gaya hidup berkelanjutan yang menekankan konsumsi secukupnya, keseimbangan aktivitas, dan perhatian penuh terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti lansia (Park & Lin, 2020). Literatur tentang gerakan “slow” juga menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dari efisiensi semata menuju kualitas interaksi sosial dan keberlanjutan lingkungan (Bocken & Short, 2016). Dalam konteks layanan Posyandu Lansia, konsep slow living dapat menjadi inspirasi bagi kader untuk mengedepankan pelayanan yang empatik, ritmis, dan berorientasi pada kenyamanan lansia sesuai prinsip keberlanjutan (Fletcher, 2010).

D. SIMPULAN

Riset ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa Cikakak dengan civitas academica telah berjalan dengan baik. Kondisi awal menunjukkan bahwa dinamika hubungan antar aktor sangat dinamis dan komunikatif sehingga memudahkan kolaborasi. Secara empiris dibutuhkan kolaborasi untuk memberdayakan para kader. Penerapan kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dalam proses awal hingga akhir kolaborasi hal tersebut ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan keterbukaan dan menerima kerjasama sehingga mendukung proses kolaborasi. Pada desain kelembagaan telah memudahkan proses kolaborasi dan tidak ada hambatan karena keputusan langsung diambil oleh kepala desa, tidak memerlukan musyawarah desa karena mempertimbangkan kebermanfaatan dan dampak baik dari adanya proses kolaborasi. Hal tersebut menunjukkan kewenangan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Berjalannya proses kolaborasi sangat interaktif dan partisipatif, teori dan kemampuan praktis telah tersampaikan dan diterima dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan bagi para kader sudah tercapai. Konsep slow living telah dimengerti dan secara praktis dapat disampaikan pada para lansia dampungnya didukung dengan penggunaan alat GSR untuk mendeteksi tingkat stres sehingga kondisi stres dapat dicegah dan kehidupan ideal dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abijaya, S., Wildanu, E., & Jamaludin, A. (2021). PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI (Studi Kasus Peran Pimpinan dalam Menjaga Soliditas Karyawan di PT. Nippon Indosari Corpindo). *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 17–26. <https://jurnal.ildikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/442>
- Amilahaq, F., Kusumawati, D. A., Irawan, B. P., Astuti, S. N., & Kusumadewi, F. (2024). Manajemen Posyandu Lansia untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RW 08 Kelurahan Pedurungan Lor. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 193–202. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v8i2.7349>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, Chris, & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Arifin, Rois, & Dkk. (2017). *Budaya dan Perilaku Organisasi*. Empat Dua Kelompok Intrans Publishing.
- Bocken, N. M. P., & Short, S. W. (2016). Towards a sufficiency-driven business model: Experiences and opportunities. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 18, 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.07.010>
- Buerk, R. (2011). *Japan's youth turn to rural areas seeking a slower life*. <https://www.bbc.com/news/business-15850243>
- Dyahariesti, N., Yuswastina, R., & Lestari, I. P. (2024). Pemberdayaan Kader Posyandu Lansia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Lansia. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 6(2), 204–208. <https://doi.org/10.35473/ijce.v6i2.3447>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ervianti, M. (2018). Faktor-Faktor yang Menghambat Collaborative Governance dalam Implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Universitas Riau*.
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep Desentralisasi dalam Pelayanan Publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74–84. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>
- Farah, M. A., & Makmur, M. H. (2022). *Pelaksanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. 9(4), 406–415. <https://e-sospol.jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/34469>
- Fitriani, N., Lestari, R., & Puspitasari, D. (2020). Pemberdayaan kader kesehatan dalam peningkatan layanan Posyandu. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 3(2), 55–62.
- Fletcher, K. (2010). Slow fashion: An invitation for systems change. *Fashion Practice*, 2(2), 259–265. <https://doi.org/10.2752/175693810X12774625387594>
- Ginting, S. E., Sufianto, D., & Sukmapriyandhika, D. (2024). KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN MELALUI FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO. *JURNAL PRINSIP*, 1(1), 398–416. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2942>
- Innes, J. ., & Booher, D. . (2003). *Collaborative policy making: Governance through dialogue*. [https://www.csus.edu/indiv/s/shulockn/executive_fellows_pdf_readings/innes %0Aand booher collaborative policymaking.pdf](https://www.csus.edu/indiv/s/shulockn/executive_fellows_pdf_readings/innes%0Aand_booher_collaborative_policymaking.pdf)
- Iswantiningsih, E., & Margaretha, S. E. P. M. (2024). *Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia*. *Journal of Nursing and Health*, 9(1), 142–145. <https://doi.org/10.52488/jnh.v9i1.426>
- Julianti, D., Rosmiati, & Lismayanti, L. (2024). Peran Program Posyandu Lansia terhadap Kesejahteraan Sosial Lansia. *Jurnal Penelitian Perawat*

- Profesional*, 6(6), 3107–3116.
- Latumahina, F., Istia., Y. J., Tahapary, E. C., Anthony, V. C., Soselisa, V. J., & Solissa, Z. (2022). Peran Posyandu Lansia Terhadap Kesejahteraan Para Lansia di Desa Ihamahu, Kec. Saparua Timur, Kab. Maluku Tengah. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 6(43), 39–45. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/19368>
- Lusi, B., Musa, D. T., Apriyani, E., Reza, L., Vera, J., & Shakila, R. (2024). Efektivitas Program Posyandu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 5(2), 162–178. <https://doi.org/10.30596/jisp.v5i2.19519>
- Mulyantari, A. D., Suharsono, A., & Anwar. (2022). Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes. Studi Kasus : Program Kemitraan PT . Pertagas dengan BUMDes Sewu Barokah Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *E-Sospol: Electronic Journal Social and Political Sciences*, 9(2), 63–75. <https://e-sospol.jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/31051>
- Nugroho, M. A. (2022). Peran Bumdes Maju Jaya dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Masaran Munjungan. *E-Sospol: Electronic Journal Social and Political Sciences*, 9(3), 264–273. <https://e-sospol.jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/36133>
- Oktarina, S., Adhyka, N., & Fadilla, N. (2024). Jurnal Pembangunan Nagari. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(1), 37–47. <https://doi.org/10.30559/jpn.v9i1.444>
- Pambudi, D. P., Rohmah, N. S., Khairurizqo, Rahmawati, T., & Ramdlani, M. R. F. (2025). ANALISIS KEBERHASILAN KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS Dimas. *Sosio Dialektika*, 10(1), 163–184. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SD/article/view/13459/6479>
- Park, H., & Lin, L. (2020). Exploring sustainable lifestyle practices: Insights from consumers adopting slow living. *Sustainability*, 12(3), 867. <https://doi.org/10.3390/su12030867>
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedur pelaksanaannya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(1), 15–24.
- Rahmawati, I., & Wibowo, A. (2015). Observasi partisipan dalam penelitian sosial. *Jurnal Penelitian Sosial*, 19(1), 45–56.
- Ranuhandoko, N., Sunarmi, & Santosa. (2025). KETERKAITAN KONSEP SLOW LIVING DENGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DI ERA MODERNISASI. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 07(02), 461–472. <https://jim.unindra.ac.id/index.php/vhdkv/article/view/10805/pdf>
- Ratnasari, A. A. (2018). Upaya pemeliharaan kesehatan lansia melalui peningkatan kapasitas kader Posyandu lansia. *Berita Kedokteran Masyarakat*. <https://doi.org/10.22146/bkm.40364>
- Rusdi, dkk. (2025). Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia melalui

- Pelatihan Penerapan 5 Meja. Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi.* <https://doi.org/10.37905/ljpmt.v4i2.33408>
- Saputra, A., & Astuti, S. J. W. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DI KOTA SURABAYA (Study Kasus Di Kelurahan Kandangan). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.113>
- Suharto, E. (2010). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 1–12.
- Suharto, R. (2016). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 122–130.
- Tengah, P. D. J. (2024). *Jumlah Posyandu Menurut Kab Kota s.d. Th. 2023.* <https://data.jatengprov.go.id/tl/dataset/jumlah-posyandu-menurut-kab-kota-s-d-th-2023>
- Thomson, A. ., & Perry, J. . (2006). Collaboration Processes: Inside the black box. *Public Administration Review.* <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>
- Wangon, P. 2. (2022). *Posyandu Lansia Desa Cikakak Puskesmas Wangon II Juara 1 Lomba Posyandu Lansia Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.* <https://puskesmas2wangon.banyumaskab.go.id/news/40735/posyandu-lansia-desa-cikakak-puskesmas-wangon-ii-juara-1-lomba-posyandu-lansia-dinas-kesehatan-kabupaten-banyumas>
- Wanna, J. (2008). Collaborative Government: Meanings Dimensions, Drivers and Outcomes. In *Collaborative Governance: a new era of publik policy in Australia* (pp. 3–12). ANU ePress. <https://researchportalplus.anu.edu.au/en/publications/collaborative-government-meanings-dimensions-drivers-and-outcomes>
- Widyaswara, P., Murdyastuti, A., & Negro, A. H. S. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. *E-Sospol: Electronic Journal Social and Political Sciences*, 9(3), 254–263. <https://e-sospol.jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/34757>
- Widjajanti, K. (2011). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 123–131.
- Widyastuti, N., & Nurhayati, T. (2019). Penguatan kapasitas kader dalam layanan kesehatan komunitas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nusantara*, 8(1), 40–48.
- Yahya, A. S., Kusmana, D., Ismunarta, & Sururama, R. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(1), 54–84. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/4151/1873>